

► KONFLIK GROJOGAN SEWU

Juliyatmono akan Temui Presiden

KARANGANYAR—Polemik objek wisata Grojogan Sewu terus bergulir. Bupati Karanganyar, Juliyatmono akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas permasalahan objek wisata Grojogan Sewu.

Bony Eko Wicaksono
redaksi@solopos.co.id

Langkah ini ditempuh agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi Grojogan Sewu. Selama ini, pemkab tak pernah mendapatkan kontribusi PAD dari retribusi Grojogan Sewu. Kontribusi pemasukan keuangan objek wisata Grojogan Sewu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah

- Bupati Karanganyar Juliyatmono siap berbicara empat mata dengan pihak Kemenhut untuk membahas kontribusi Grojogan Sewu.
- Jika tak membuahkan hasil, Bupati akan menemui Presiden SBY.

pusat. Padahal, lokasinya berada di wilayah Bumi Intanpari.

"Dalam waktu dekat, saya akan mendatangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membahas masalah ini [kontribusi Grojogan Sewu]. Jika mentok, saya akan menemui Pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]," ujarnya saat ditemui wartawan, Rabu (5/2).

Menurut Yuli, pihaknya ingin mengelola kawasan Tawangmangu secara komprehensif. Pasalnya, kawasan Tawangmangu termasuk Grojogan Sewu berpotensi menjadi penyumbang PAD dari sektor pariwisata antara Rp5miliar hingga Rp7 miliar. Bahkan, bila dikelola secara maksimal dengan menata area parkir kendaraan bermotor dan fasilitas pariwisata,

Grojogan Sewu bisa menyumbang pemasukan PAD lebih dari Rp10 miliar.

Karena itu, pihaknya siap berbicara empat mata dengan pihak Kemenhut untuk membahas kontribusi dari Grojogan Sewu. Harapannya, pemerintah pusat mengabdikan permintaan Pemkab terkait kontribusi pemasukan PAD dari Grojogan Sewu. "Bisa lebih dari Rp10 miliar jika kawasan Tawangmangu dikelola secara komprehensif mulai dari area parkir hingga pusat jajanan," jelasnya.

Audit

Retribusi Grojogan Sewu dilarang diberikan ke Pemkab Karanganyar setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009 silam.

Audit BPK menyatakan retribusi Grojogan Sewu dilarang diberikan ke pemerintah daerah setempat lantaran aset milik Kementerian Kehutanan.

Terpisah, Direktur PT Duta Indonesia Jaya, Sukirdi menyatakan siap memberikan kontribusi pemasukan PAD Karanganyar. Persyaratannya, ada payung hukum yang mengatur tentang kontribusi pemasukan PAD Karanganyar. Selama ini, Grojogan Sewu dikelola oleh PT Duta Indonesia Jaya yang melakukan kontrak kerjasama dengan Kemenhut.

Sebagian retribusi tiket masuk pengunjung Grojogan Sewu diberikan ke kas negara. Sementara sebagian lainnya dikelola langsung oleh PT Duta Indonesia Jaya.

"Asal ada payung hukum yang jelas tak ada masalah. Kami siap memberikan kontribusi pemasukan PAD Karanganyar dari Grojogan Sewu. Grojogan Sewu kan berada di lahan milik Kementerian Kehutanan," terang dia.

GALEG DPR